

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas pengungkapan telah dilakukan oleh Solikhah dan Winarsih (2016) dengan sampel sebanyak 128 perusahaan yang terdiri dari enam perusahaan industri yaitu perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *multiple directorship* dan ukuran dewan komisaris, berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Aziz (2014) meneliti mengenai karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report*. Penelitian ini menggunakan 15 sampel perusahaan dengan menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia, sedangkan ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia.

Rupley *et al.* (2012) meneliti mengenai tata kelola, media, dan kualitas pengungkapan lingkungan. Penelitian ini menggunakan 127 sampel perusahaan dengan menggunakan uji karakteristik pemerintahan dan media. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa liputan media, komite tanggung jawab sosial perusahaan, komisaris independen, dan *multiple directorship* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa investor institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungannya.

Rao *et al.* (2011) meneliti mengenai kualitas *voluntary environmental disclosure*. Penelitian ini menggunakan 100 perusahaan terbesar di Australia yang terdaftar di Australian Stock Exchange (ASX) dengan menggunakan regresi OLS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas *voluntary environmental disclosure*.

Siregar *et al.* (2013) meneliti mengenai hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja komite audit dengan kualitas pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan mamufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif signifikan antara kinerja komite audit dengan kualitas pengungkapan CSR.

2.2 Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori mengenai hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) antara prinsipal dan agen, karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori *agency* menyatakan dengan adanya hubungan ketidakseimbangan informasi, akan terdapat dua kepentingan yang dihadapi oleh manajer, yang pertama yaitu manajer sebagai agen akan menghadapi oleh pilihan dalam menentukan kebijakan dalam memaksimalkan kepentingan para prinsipal yaitu para pemilik perusahaan baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek atau memilih untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mengindikasikan manajer bertindak semaunya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan pihak prinsipal. Untuk menghindari hal tersebut beberapa penelitian menyatakan teori keagenan dapat dikurangi dengan meningkatkan pengungkapan.

Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk memonitor masalah agensi adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Solikhah dan Winarsih (2016) menyatakan *corporate governance* merupakan mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya konsep *corporate governance*, pihak manajemen (agen) diharapkan dapat dipercaya dalam mengelola kekayaan pemilik (prinsipal), dan pemilik juga yakin bahwa agen bertindak sewajarnya dan tidak melakukan kecurangan untuk kepentingan agen sendiri sehingga dapat meminimalkan konflik serta biaya keagenan.

2. Kualitas Environmental Disclosure

Envirometal Disclosure merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam laporan perusahaan (Suratno *et al.*, 2007). Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari berbagai model pengungkapan informasi dan merupakan sebuah trend baru dalam praktik pengungkapan di lingkungan perusahaan. *Environmental disclosure* merupakan pengungkapan sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat oleh perusahaan untuk menginformasikan aktivitasnya, di mana pengungkapan kuantitatif berupa informasi keuangan maupun nonkeuangan. Dengan melihat *environmental disclosure* ini, dapat diketahui perusahaan mana saja yang telah menerapkan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang menerbitkan *evnironmental disclosure* yang berkualitas akan memberikan informasi yang baik kepada *stakeholder*.

Environmental disclosure dikatakan berkualitas ketika informasi yang diungkapkan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholder*. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pengukuran *environmental index scorecard* yang dilakukan oleh Rupley *et al.* (2012), dimana pengukuran kualitas *environmental disclosure* diklasifikasi menjadi 4 (empat) tingkatan strategi lingkungan yaitu, *compliance* (kepatuhan) yang menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungannya, *pollution prevention* (pencegahan polusi) yang menunjukkan tingkat pencegahan polusi yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, *product stewardship* (penanganan produk) yang menunjukkan pengawasan yang dilakukan perusahaan terhadap produk yang di produksi, dan *sustainable development* (pengembangan berkelanjutan) yang dilakukan perusahaan.

3. *Corporate Governance*

Corporate Governance adalah suatu sistem, proses, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) demi tercapainya tujuan organisasi (IAI, 2015). *Corporate governance* merupakan mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya konsep *corporate governance*, pihak manajemen (agen) diharapkan dapat dipercaya dalam mengelola kekayaan pemilik (prinsipal), dan pemilik juga yakin bahwa agen bertindak sewajarnya dan tidak melakukan kecurangan untuk kepentingan agen sendiri sehingga dapat meminimalkan konflik serta biaya keagenan. Tujuan *Corporate governance* yaitu untuk menciptakan

tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*. Terdapat 5 asas *good corporate governance* yaitu:

1. Transparansi (*Transparancy*)

Perusahaan harus menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis dan menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

3. Responsibilitas (*Responsibility*),

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*),

Perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*).

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Adapun struktur *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran *multiple directorship*, dan ukuran komite audit.

Penjelasan mengenai proksi yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme dalam pengendalian internal tertinggi suatu perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola perusahaan secara efektif (Mutia *et al.*, 2011). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan GCG. Dewan komisaris bertugas untuk memonitoring dan mengontrol manajemen operasional perusahaan tetapi tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Setiap anggota dewan komisaris dalam perusahaan diangkat melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Undang - undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 92 menyatakan dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih dan bagi perseroan terbatas yang menghimpun dana dari masyarakat wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.

2. Komisaris Independen

Menurut Bapepam No. 29/PM/2004 komisaris Independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas dan bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen dibutuhkan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan

pemegang saham maupun kepentingan manajemen (Nabila dan Daljono, 2013). Keberadaan komisaris independen bersikap netral, karena tidak ada pengaruh dari manajemen. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh *stakeholder* semakin objektif (Rupley *et al.*, 2012).

3. *Multiple-Directorships*

Multiple-Directorships merupakan anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai dewan komisaris pada perusahaan lain. Anggota dewan yang bekerja di berbagai perusahaan atau memiliki pekerjaan lain cenderung memiliki reputasi sebagai anggota yang memiliki nilai tambah dibandingkan anggota lain (Rupley. *et al.*, 2012). Dalam pengungkapan lingkungan, perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang bekerja di beberapa perusahaan akan memiliki kualitas pengungkapan lingkungan lebih tinggi dari pada anggota dewan komisaris yang hanya bekerja di satu perusahaan. Hal tersebut karena anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai dewan komisaris di perusahaan lain lebih memiliki pengalaman dalam pengawasan pelaporan lingkungan (Rupley *et al.*, 2012).

4. Komite Audit

Siregar *et al.* (2013) menyatakan bahwa komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang berfungsi dalam membantu dewan komisaris melaksanakan tugasnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Dewan Komisaris. Anggota komite audit

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang bukan merupakan pihak internal perusahaan, dan memiliki keahlian, pengalaman dibidang audit dan kualitas lain yang diperlukan.

Anggota komite audit yang berasal dari dewan komisaris perseroan bertindak sebagai ketua komite audit. Komite audit merupakan alat untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat meminimalisir biaya serta dapat meningkatkan kualitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Ukuran komite audit yang semakin besar maka diharapkan pengawasan yang dilakukan pada perusahaan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan.

2.3 Hubungan *Corporate Governance* dengan Kualitas *Environmental Disclosure*

Corporate governance adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* merupakan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan yang digunakan dalam meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perseroan sesuai dengan prinsip *GCG*.

Solikhah dan Winarsih (2016) menyatakan bahwa semakin banyak dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka pengungkapan lingkungan yang dibuat juga akan semakin berkualitas hal ini dikarenakan terdapat sistem pengawasan dan monitoring yang baik dari perusahaan. dengan adanya dewan komisaris yang memiliki proporsi yang banyak maka,

pengawasan yang dilakukan akan dapat mencegah pengendalian yang lebih oleh manajemen. Teori agensi menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin mudah dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pihak manajemen akan lebih efektif (Sembiring, 2005).

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau berasal dari pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan anggota direksi dan dewan komisaris lain maupun dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen dalam melakukan perannya sebagai fungsi pengawasan, dewan komisaris akan memantau manajemen agar keputusan yang diambil tidak merugikan para pemangku kepentingan.

Muktiyanto (2011) menyatakan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen maka mampu mendorong manajemen dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan yang strategis. Dapat dikatakan bahwa, dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat. Hal ini termasuk dalam melakukan pengawasan atas pelaporan *environmental disclosure*, karena semakin banyak proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan, maka dapat mendukung prinsip *responsibilitas*

dalam penerapan *corporate governance* bagi perusahaan terhadap pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*.

Anggota dari dewan komisaris yang memiliki jabatan di perusahaan lain atau disebut dengan *multiple directorship* akan mendapatkan pengetahuan dan interaksi dari berbagai dewan komisaris lainnya di berbagai perusahaan, sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh lebih banyak dalam melakukan pengungkapan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupley *et al.* (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris yang bekerja di perusahaan lain akan mendapatkan pengetahuan dari anggota dewan lainnya. Dengan adanya dewan komisaris yang bekerja di beberapa perusahaan lain maka akan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih, termasuk pengungkapan lingkungan. Sehingga dalam melakukan pengungkapan lingkungan, perusahaan yang memiliki anggota dewan yang bekerja di perusahaan lain, akan memiliki kualitas yang lebih tinggi akan pengungkapan lingkungan karena telah mendapat perbandingan dengan perusahaan lain.

Untoro dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa tugas dari komite audit dapat dirasakan sebagai pengawasan atau monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih terhadap pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, dengan adanya proporsi komite audit yang semakin banyak maka diharapkan proses pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial yang di ungkapkan akan semakin luas. Komite audit juga merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan

sehingga dapat mengurangi biaya agensi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Frocker, 1992).

2.4 Perumusan Hipotesis

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kualitas *Environmental Disclosure*

Corporate governance merupakan mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya konsep *corporate governance*, pihak manajemen (agen) diharapkan dapat dipercaya dalam mengelola kekayaan pemilik (prinsipal), dan pemilik juga yakin bahwa agen bertindak sewajarnya dan tidak melakukan kecurangan untuk kepentingan agen sendiri sehingga dapat meminimalkan konflik serta biaya keagenan. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai telah berupaya menyampaikan seluruh informasi kepada para pemangku kepentingan termasuk laporan keberlanjutannya (*sustainability report*). Dalam penelitian ini *corporate governance* diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, *multiple directorship*, dan proporsi komite audit yang dimiliki perusahaan.

Tugas utama dewan komisaris dalam *corporate governance* yaitu mengawasi dan mengevaluasi dalam pembuatan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasehat kepada dewan direksi (IAI, 2015). Dalam teori agensi dijelaskan bahwa dengan ukuran dewan komisaris yang semakin besar maka akan memudahkan untuk melakukan pengendalian terhadap agen serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, semakin banyak dewan komisaris dalam

suatu perusahaan, maka pengungkapan lingkungan juga akan semakin berkualitas karena adanya sistem pengawasan dan monitoring yang baik dari perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rupley *et al.* (2012), Solikhah dan Winarsih (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan.

Komisaris independen dibutuhkan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham maupun kepentingan manajemen. Keberadaan komisaris independen bersikap netral, karena tidak ada pengaruh dari manajemen. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh stakeholder semakin objektif (Rupley *et al.*, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah dan Winarsih (2016) yang meneliti mengenai tata kelola perusahaan dan kualitas pengungkapan lingkungan, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa adanya hubungan positif antara komisaris independen dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupley *et al.* (2012) yang menunjukkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Multiple-directorship merupakan anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai dewan komisaris lebih dari satu perusahaan. Dewan komisaris yang menjabat sebagai *multiple directorship* biasanya akan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak di bandingkan

dengan dewan komisaris yang hanya bekerja pada satu perusahaan saja. Dalam pengungkapan lingkungan, perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai *multiple directorships* akan memiliki kualitas pengungkapan lingkungan lebih baik dibandingkan dengan anggota dewan komisaris yang hanya bekerja di satu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah dan Winarsih (2016) yang meneliti mengenai tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa adanya hubungan positif antara *multiple directorships* dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rupley *et al.*, 2012) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *multiple directorships* dengan kualitas pengungkapan lingkungan.

Komite audit merupakan alat untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat meminimalisir biaya serta dapat meningkatkan kualitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Ukuran komite audit yang semakin besar maka diharapkan pengawasan yang dilakukan pada perusahaan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rupley *et al.* (2012) yang meneliti mengenai tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa adanya hubungan positif antara komite dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H: *Corporate Governance* Berpengaruh Positif terhadap Kualitas
*Environmental Disclosure***

2.5 Kerangka Pemikiran

